



Optimalisasi Komunikasi Pemerintah Daerah oleh BPBD dalam Penanganan Risiko Banjir di Kabupaten Tulungagung

Laily Purnawati¹, Helsa Adnanda Satria Cahya², Erik Wijaya³, Yongki Ainun Ikhsan⁴,
Andri Wahyudi⁵

¹⁻⁵Universitas Tulungagung, Indonesia

Email: lailypurnawatisip@gmail.com^{1}, helsaadnanda03@gmail.com², ericwijaya938@gmail.com³,
arju07167@gmail.com³, andriwahyudi1964@gmail.com⁵

*Penulis Korespondensi: lailypurnawatisip@gmail.com

Abstract. Flood disasters are recurring hydrometeorological hazards that significantly impact social, economic, and environmental conditions in Tulungagung Regency. This study aims to analyze the flood disaster mitigation communication strategies implemented by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Tulungagung Regency and to identify the roles, challenges, and implications of both internal and external communication in flood disaster management. The research employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with the Secretary of BPBD Tulungagung Regency, the Head of the Emergency and Logistics Division, the Head of the Prevention and Preparedness Division, and members of flood-affected communities. The findings reveal that BPBD Tulungagung Regency has attempted to optimize disaster communication during the pre-disaster, emergency response, and post-disaster phases. The effectiveness of these communication efforts remains limited due to several challenges, including inadequate communication infrastructure, varying levels of disaster literacy among community members, diverse geographical conditions, and insufficient coordination in internal and external communication. Pre-disaster communication plays an essential role in improving community preparedness, communication during emergency response supports timely and accurate decision-making, and post-disaster communication contributes to recovery processes and the strengthening of community resilience. This study concludes that optimizing disaster communication requires integrated information systems, improved human resource capacity within BPBD, and active community participation through community-based communication approaches to sustainably enhance resilience to flood risks.

Keywords: BPBD; Community Preparedness; Communication Strategy; Disaster Communication; Flood Disaster Mitigation.

Abstrak. Bencana banjir merupakan ancaman hidrometeorologi yang kerap terjadi di Kabupaten Tulungagung dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, serta lingkungan yang signifikan. Dalam upaya mengurangi risiko bencana, komunikasi pemerintah daerah memiliki peran strategis, khususnya dalam kegiatan mitigasi bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi mitigasi bencana banjir yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulungagung, serta mengidentifikasi peran, tantangan, dan implikasi komunikasi internal maupun eksternal dalam penanggulangan bencana banjir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap Sekretaris BPBD Kabupaten Tulungagung, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, serta masyarakat yang terdampak banjir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Tulungagung telah berupaya mengoptimalkan komunikasi kebencanaan pada tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Efektivitas komunikasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana komunikasi, perbedaan tingkat literasi kebencanaan masyarakat, kondisi geografis yang beragam, serta belum optimalnya koordinasi komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi kebencanaan yang efektif terbukti berperan penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan, mempercepat pengambilan keputusan, serta mendukung proses pemulihan pascabencana. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi sistem komunikasi kebencanaan yang terintegrasi dan berbasis partisipasi masyarakat guna meningkatkan ketahanan terhadap risiko banjir secara berkelanjutan.

Kata kunci: Mitigasi Bencana Banjir; Strategi Komunikasi; Komunikasi Kebencanaan; BPBD; Kesiapsiagaan Masyarakat.

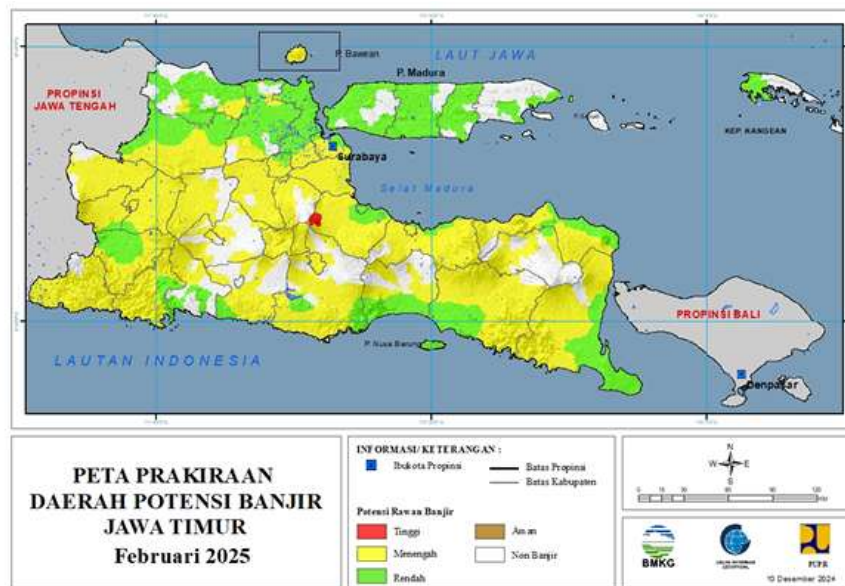
1. LATAR BELAKANG

Bencana banjir merupakan fenomena hidrometeorologi yang secara periodik berdampak besar terhadap masyarakat di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Tulungagung, yang secara geografis rentan terhadap limpasan air permukaan dan sungai yang meluap saat musim hujan tiba. Fenomena ini bukan hanya menimbulkan kerugian materiil dan sosial, tetapi juga menguji kapasitas pemerintah daerah dalam merespons risiko secara cepat dan efektif. Dalam konteks penanggulangan bencana, komunikasi pemerintah daerah menjadi elemen penting untuk menyampaikan informasi risiko, peringatan dini, serta langkah-langkah kesiapsiagaan kepada publik yang terdampak. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komunikasi bencana yang efektif mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mengurangi ketidakpastian saat krisis, namun kekeliruan dalam penyampaian pesan dapat memperburuk situasi dan menimbulkan informasi yang belum terverifikasi. Rahman et al (2025) menemukan bahwa penggunaan media sosial oleh institusi pemerintah seperti BPBD dan Diskominfo dapat mempercepat penyebaran informasi selama banjir, meskipun demikian tantangan seperti disinformasi dan koordinasi masih perlu diatasi untuk memaksimalkan manfaatnya. Konsep dasar komunikasi dalam penanggulangan bencana menegaskan bahwa strategi penyampaian informasi yang tepat dan terpadu sangat penting tidak hanya saat tanggap darurat, tetapi juga dalam fase pra-bencana, sehingga masyarakat dapat memahami risiko yang dihadapi serta mengembangkan respons yang adaptif.

Penanggulangan bencana dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu fase pra-bencana, fase saat bencana berlangsung, dan fase pascabencana. Tahap pra-bencana merupakan langkah awal yang krusial dalam menurunkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana serta menekan risiko yang dapat terjadi baik sebelum, saat, maupun setelah bencana berlangsung. Fase ini menjadi bagian paling strategis karena mencakup berbagai kegiatan ketika bencana belum terjadi, seperti perencanaan penanggulangan bencana, penyusunan rencana pembangunan, analisis risiko bencana, serta pelaksanaan pelatihan. Selanjutnya, ketika suatu wilayah berada dalam kondisi berpotensi mengalami bencana, diperlukan upaya kesiapsiagaan, mitigasi, dan sistem peringatan dini.

Model siklus komunikasi bencana menunjukkan bahwa sebelum terjadinya bencana, upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan harus dilakukan secara optimal. Setelah bencana terjadi, tahapan yang diperlukan meliputi penanganan darurat atau tanggap darurat, rehabilitasi untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan, serta rekonstruksi sebagai proses pembangunan kembali. Komunikasi bencana merupakan pendekatan yang bersifat menyeluruh dalam upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana melalui pengelolaan proses

penyusunan pesan atau informasi kebencanaan, penyebaran informasi, hingga penerimaan pesan yang berlangsung sejak tahap pra-bencana, saat bencana terjadi, hingga pascabencana. Dalam fase pra-bencana, komunikasi memegang peranan penting karena melalui penyampaian informasi yang tepat, masyarakat dapat mengurangi rasa khawatir dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi potensi bencana. Secara umum, komunikasi merupakan proses yang melibatkan individu, kelompok, organisasi, maupun masyarakat dalam menciptakan dan memanfaatkan informasi agar terjalin hubungan dan interaksi dengan lingkungan serta pihak lain, baik melalui komunikasi verbal berupa bahasa lisan dan tulisan maupun komunikasi nonverbal seperti gerak tubuh, ekspresi, dan bentuk isyarat lainnya.



Gambar 1. Peta Dearah Rawan Banjir Jawa Timur.

Berdasarkan data prakiraan wilayah berpotensi banjir yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pada Februari 2025 Kabupaten Tulungagung diprediksi memiliki potensi kejadian banjir pada kategori sedang dan rendah. Wilayah dengan tingkat potensi banjir sedang mencakup Kecamatan Boyolangu, Gondang, Kauman, Kedungwaru, Ngantru, Pagerwojo, Sendang, dan Tulungagung. Sementara itu, wilayah dengan potensi banjir rendah meliputi Kecamatan Besuki, Boyolangu, Campurdarat, Kalidawir (BMKG, 2024)

Berdasarkan data prakiraan wilayah berpotensi banjir yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pada Februari 2025 Kabupaten Tulungagung diprediksi memiliki potensi kejadian banjir pada kategori sedang dan rendah. Wilayah dengan tingkat potensi banjir sedang mencakup Kecamatan Boyolangu, Gondang, Kauman, Kedungwaru, Ngantru, Pagerwojo, Sendang, dan Tulungagung. Sementara itu,

wilayah dengan potensi banjir rendah meliputi Kecamatan Besuki, Boyolangu, Campurdarat, Kalidawir (Media Indonesia,2025).

Dalam implementasinya, BPBD Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya menjalankan seluruh tahapan siklus manajemen bencana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Permasalahan utama yang dihadapi berkaitan dengan aspek komunikasi dalam perencanaan penanggulangan bencana, khususnya terkait penyusunan rencana kontingensi. Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Tulungagung belum memiliki rencana kontingensi yang terintegrasi dalam seluruh tahapan manajemen bencana.

Oleh karena itu, perencanaan yang komprehensif serta komunikasi organisasi yang efektif menjadi kebutuhan mendasar agar setiap tahapan penanganan bencana dapat dilaksanakan secara optimal, termasuk dalam hal koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait. Lemahnya komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tulungagung dapat ditinjau dari dua dimensi, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Pada sisi internal, efektivitas komunikasi antarunit di dalam organisasi BPBD masih belum optimal, sehingga menghambat proses koordinasi dan berdampak pada rendahnya tingkat kesiapsiagaan serta kurang responsifnya penanganan saat bencana terjadi. Dalam konteks ini, komunikasi interpersonal berperan sebagai sarana penting dalam komunikasi internal organisasi untuk menyampaikan pesan yang bersifat persuasif, dengan tujuan akhir tercapainya kesamaan pemahaman antara pesan yang disampaikan dan diterima oleh para pelaku komunikasi (Rahmawinati & Zulfiningrum, 2023).

Pada praktik penanganan banjir, BPBD Kabupaten Tulungagung cenderung memberikan respons setelah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Proses komunikasi eksternal kepada masyarakat dinilai masih belum memadai, yang tercermin dari rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat Tulungagung mengenai risiko banjir, termasuk langkah-langkah pencegahan dan tindakan darurat yang seharusnya dilakukan. Kondisi tersebut berpotensi memperparah dampak bencana, karena masyarakat yang tidak memperoleh informasi secara memadai cenderung tidak mampu melakukan upaya pencegahan maupun kesiapsiagaan ketika menghadapi situasi darurat. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai risiko banjir juga diperkuat oleh pandangan sebagian warga Tulungagung yang menganggap banjir bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai fenomena yang membawa berkah, sehingga mereka bersikap pasrah terhadap curah hujan tinggi yang kerap memicu terjadinya banjir.

Upaya pengurangan risiko bencana menjadi kebutuhan yang mendesak dan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap potensi bahaya banjir serta langkah-langkah pencegahan dan penanganannya. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mendukung strategi mitigasi bencana, sehingga pemerintah daerah dapat lebih siap dan mampu mengelola risiko ketika ancaman banjir muncul. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis upaya mitigasi banjir melalui komunikasi bencana yang diterapkan oleh BPBD Kabupaten Tulungagung, termasuk mengidentifikasi faktor penyebab dan dampak dari lemahnya komunikasi internal maupun eksternal dalam penanggulangan bencana banjir.

Literatur komunikasi risiko bencana telah berkembang, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam konteks implementasi pada level pemerintahan daerah khususnya BPBD di wilayah seperti Kabupaten Tulungagung. Studi di Semarang oleh Arzuri & Zulfiningrum (2025) menyatakan komunikasi bencana yang dibangun oleh BPBD melalui media digital dan kolaborasi antar lembaga dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, tetapi belum menjelaskan secara rinci bagaimana strategi komunikasi tersebut dioptimalkan dalam penanganan risiko banjir yang spesifik di daerah lain dengan karakter demografis dan kelembagaan berbeda. Penelitian di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa peran BPBD dalam pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan peringatan dini penting dalam mitigasi banjir, tetapi masih mengindikasikan perlunya model komunikasi yang lebih efektif untuk mencapai keterlibatan masyarakat yang lebih luas (Wildani, 2023).

Situasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai penelitian mengenai komunikasi bencana dan peran BPBD di beberapa daerah, masih diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai optimalisasi komunikasi pemerintah daerah dalam konteks risiko banjir di Kabupaten Tulungagung termasuk pemetaan saluran komunikasi, hambatan dalam penyampaian informasi, serta implikasi strategisnya terhadap kesiapsiagaan dan respons masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Komunikasi Risiko Bencana

Komunikasi risiko bencana merupakan proses penyampaian informasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai potensi bahaya, tingkat risiko, serta tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan yang perlu dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Dalam konteks banjir, komunikasi risiko tidak hanya berfokus pada penyampaian peringatan dini, tetapi juga mencakup edukasi berkelanjutan agar masyarakat mampu mengenali tanda-

tanda ancaman dan merespons secara tepat. Teori komunikasi risiko menekankan pentingnya kejelasan pesan, konsistensi informasi, kredibilitas sumber, serta penggunaan saluran komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Komunikasi yang efektif juga harus bersifat dua arah, memungkinkan adanya umpan balik dari masyarakat sehingga pemerintah dapat menyesuaikan strategi komunikasinya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal (Utami, 2022).

Komunikasi bencana dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu komunikasi pra-bencana yang berfokus pada analisis faktor penyebab risiko serta peningkatan kesiapsiagaan, komunikasi pada fase tanggap darurat yang bertujuan menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan dapat dipercaya untuk meminimalkan dampak negatif bencana, serta komunikasi pascabencana yang diarahkan pada proses pemulihan dengan mengupayakan kembalinya kehidupan masyarakat ke kondisi normal melalui perbaikan dan pembangunan kembali berbagai aspek kehidupan (Frasetya et al., 2021).

Peran BPBD dalam Komunikasi Penanganan Risiko Banjir

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran sentral sebagai institusi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan penanggulangan bencana, termasuk dalam aspek komunikasi kebencanaan. BPBD berfungsi sebagai sumber informasi resmi yang menyampaikan pesan terkait peringatan dini, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dalam penanganan risiko banjir, BPBD dituntut untuk membangun komunikasi yang terintegrasi baik secara internal antarunit kerja maupun secara eksternal dengan masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya. Komunikasi internal yang efektif diperlukan untuk memastikan koordinasi yang cepat dan akurat, sementara komunikasi eksternal berperan dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Optimalisasi peran BPBD dalam komunikasi kebencanaan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem penanggulangan banjir yang responsif dan berkelanjutan (Arzuri & Zulfiningrum, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali fenomena tersebut secara menyeluruh melalui pemaparan deskriptif dalam bentuk narasi dan

bahasa, yang dilakukan dalam konteks alamiah dengan memanfaatkan beragam prosedur ilmiah.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang disesuaikan dengan kondisi dan data yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik serta fakta yang berkaitan dengan populasi atau wilayah tertentu. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori, data empiris, dan konsep-konsep yang relevan sebagai kerangka acuan untuk menafsirkan hasil penelitian, melakukan analisis, serta menjawab permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi mitigasi bencana banjir yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulungagung. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada aspek komunikasi mitigasi bencana guna mempermudah peneliti dalam pelaksanaan penelitian serta proses pengumpulan dan pengolahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yang diklasifikasikan berdasarkan jenis dan sumber data, berupa wawancara pada beberapa narasumber yang meliputi Sekretaris BPBD Kabupaten Tulungagung, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tulungagung, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tulungagung serta warga terdampak banjir.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan kondisi atau situasi yang terjadi melalui analisis kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian dengan memaparkan secara rinci temuan-temuan yang diperoleh di lapangan. Peneliti menggambarkan dan menyusun fenomena yang diteliti secara sistematis berdasarkan teori yang relevan guna menarik kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah. Pendekatan kualitatif ini, data yang terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian serta dianalisis dengan memperhatikan keterkaitan dan pengaruhnya terhadap objek yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi BPBD dalam Optimalisasi Komunikasi Pemerintah Daerah pada Mitigasi Banjir

BPBD Kabupaten Tulungagung memegang peranan strategis sebagai aktor utama dalam pengelolaan komunikasi pemerintah daerah terkait penanganan risiko banjir, mengingat karakteristik wilayah Tulungagung yang secara geografis dan hidrologis memiliki tingkat kerawanan banjir yang cukup tinggi. Peran strategis ini tidak hanya diwujudkan dalam penyampaian informasi ketika bencana telah terjadi, tetapi juga dalam proses komunikasi pra-bencana yang berorientasi pada mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Komunikasi yang terencana dan berkelanjutan, BPBD berupaya membangun kesadaran risiko

(*risk awareness*) masyarakat agar memahami potensi ancaman banjir, tanda-tanda awal bencana, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan temuan Lestari et al (2022) yang menegaskan bahwa komunikasi bencana merupakan fondasi utama dalam manajemen risiko bencana di tingkat daerah, karena keberhasilan kebijakan mitigasi sangat ditentukan oleh sejauh mana informasi kebencanaan dapat diterima, dipahami, dan diinternalisasi oleh masyarakat sasaran.

Strategi yang dilakukan oleh BPBD kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

Komunikasi Pra-Bencana sebagai Upaya Pencegahan dan Peningkatan Kesiapsiagaan

Komunikasi pra-bencana merupakan tahapan paling strategis dalam mitigasi risiko banjir karena berfokus pada upaya pencegahan dan pengurangan dampak sebelum bencana benar-benar terjadi. Pada tahap ini, komunikasi tidak hanya dimaknai sebagai penyampaian informasi satu arah, tetapi sebagai proses membangun pemahaman bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat mengenai potensi ancaman, tingkat kerentanan, serta kapasitas yang dimiliki untuk menghadapi risiko banjir (Sopacua & Salakay, 2020).

Praktik komunikasi pra-bencana tersebut sangat relevan untuk diterapkan di Kabupaten Tulungagung, mengingat karakteristik wilayahnya yang memiliki daerah rawan banjir dan struktur sosial masyarakat yang masih kuat pada tingkat lokal. Pemanfaatan media sosial dan grup pesan instan, seperti WhatsApp atau platform digital lainnya, dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi kebencanaan secara cepat dan real-time. Peran perangkat desa, tokoh masyarakat, serta RT/RW sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam memastikan pesan mitigasi tersampaikan secara merata dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan yang memiliki keterbatasan akses terhadap media digital. Kombinasi media modern dan komunikasi berbasis komunitas, pesan pra-bencana diharapkan lebih mudah dipahami dan memiliki daya dorong untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Rahman et al., 2025). Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa:

“sebelum musim hujan, kami selalu berupaya menyampaikan informasi terkait daerah rawan banjir, langkah-langkah kesiapsiagaan, serta imbauan kepada masyarakat agar lebih waspada”.

Komunikasi pra-bencana yang dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis, masyarakat tidak hanya menerima peringatan dini, tetapi juga dibekali pengetahuan dan keterampilan kesiapsiagaan yang memadai. Pengetahuan tersebut mencakup kemampuan mengenali jalur evakuasi yang aman, mempersiapkan perlengkapan darurat dan dokumen

penting, serta memahami tindakan yang harus dilakukan ketika debit air mulai meningkat. Komunikasi pra-bencana berfungsi sebagai fondasi utama dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap risiko banjir, karena mampu meningkatkan kesiapsiagaan, mengurangi kepanikan saat bencana terjadi, serta meminimalkan kerugian jiwa dan harta benda (Permana, 2023).

Komunikasi pada Tahap Tanggap Darurat dalam Penanganan Risiko Banjir

Pada saat bencana banjir terjadi, komunikasi pemerintah daerah harus diarahkan pada penyampaian informasi situasional yang cepat, akurat, konsisten, dan dapat dipercaya, karena fase tanggap darurat merupakan periode kritis yang menentukan keselamatan masyarakat dan efektivitas penanganan bencana. Informasi yang disampaikan mencakup kondisi terkini banjir, wilayah terdampak, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, serta instruksi keselamatan yang harus segera dilakukan oleh masyarakat (Arzuri & Zulfiningrum, 2025).

Optimalisasi komunikasi pada tahap tanggap darurat dapat dilakukan dengan mengintegrasikan laporan dari masyarakat, relawan, dan aparat pemerintah daerah melalui sistem komunikasi terpusat yang dikelola oleh BPBD. Integrasi ini memungkinkan BPBD memperoleh gambaran kondisi lapangan secara menyeluruh dan real-time, sehingga respons yang diberikan lebih tepat sasaran.

Kesadaran situasional (*situational awareness*) dalam komunikasi bencana, yaitu kemampuan lembaga penanggulangan bencana untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data secara cepat sebagai dasar pengambilan keputusan. Kesadaran situasional yang baik memungkinkan BPBD untuk memahami dinamika bencana yang terus berubah, termasuk peningkatan debit air, aksesibilitas wilayah, serta kebutuhan mendesak masyarakat terdampak. Komunikasi dua arah menjadi elemen kunci, karena masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai sumber data lapangan yang sangat berharga (Silalahi & Trimurni, 2024).

Komunikasi dua arah yang efektif, BPBD Kabupaten Tulungagung dapat memprioritaskan wilayah terdampak berdasarkan tingkat urgensi, melakukan evakuasi secara lebih terencana, serta mendistribusikan bantuan logistik dan layanan kesehatan secara efisien. Informasi yang diperoleh dari masyarakat dan relawan memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar berdasarkan asumsi atau data sekunder. Komunikasi pada tahap tanggap darurat tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pengambilan keputusan dan koordinasi lintas sektor, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan korban jiwa dan kerugian akibat bencana banjir (Tresnanti et al., 2024).

Komunikasi Pasca-Bencana dalam Pemulihan dan Pengurangan Risiko Berkelanjutan

Komunikasi pasca-bencana merupakan tahapan penting yang diarahkan tidak hanya pada proses pemulihan (*recovery*), tetapi juga pada evaluasi menyeluruh guna mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Pada fase ini, komunikasi pemerintah daerah berperan dalam menjembatani kebutuhan masyarakat terdampak dengan kebijakan dan program pemulihan yang dirancang oleh pemerintah. BPBD Kabupaten Tulungagung menjalankan komunikasi pasca-bencana dengan menyampaikan informasi terkait penyaluran bantuan, rehabilitasi infrastruktur, serta rencana tindak lanjut pasca-banjir kepada masyarakat terdampak. Sekretaris BPBD Kabupaten Tulungagung dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“setelah banjir surut, kami tetap melakukan komunikasi dengan masyarakat untuk mendata kerusakan dan memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik”.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa komunikasi pasca-bencana dipahami sebagai proses berkelanjutan yang tidak berhenti ketika kondisi darurat berakhir, melainkan terus dilakukan untuk memastikan pemulihan berjalan secara inklusif dan tepat sasaran.

Komunikasi pasca-bencana berfungsi sebagai sarana pembelajaran bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengidentifikasi kelemahan dalam penanganan bencana sebelumnya serta memperbaiki strategi mitigasi di masa depan. Penyampaian informasi mengenai hasil pendataan kerusakan, evaluasi respons tanggap darurat, dan rencana pengurangan risiko menjadi bagian penting dari komunikasi publik (Nurdin, 2015). Komunikasi pasca-bencana yang dilakukan secara transparan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Hal ini tercermin dari pernyataan warga terdampak banjir yang mengungkapkan bahwa:

“adanya komunikasi lanjutan dari BPBD membuat kami merasa diperhatikan dan lebih siap jika banjir terjadi lagi”.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa komunikasi pasca-bencana memiliki dampak psikososial yang signifikan, karena mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kesiapan, serta mendorong masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi bencana di masa depan (Safitri et al., 2020)

Komunikasi pasca-bencana yang dijalankan BPBD Kabupaten Tulungagung tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi pemulihan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun ketahanan masyarakat secara berkelanjutan. Komunikasi yang transparan, dua arah, dan partisipatif, masyarakat didorong untuk terlibat aktif dalam proses evaluasi dan perencanaan pengurangan risiko bencana. Keterlibatan ini

menjadi modal sosial penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat strategi mitigasi, sehingga risiko dan dampak banjir di masa mendatang dapat diminimalkan.

Tantangan Strategi Optimalisasi Komunikasi Pemerintah Daerah

BPBD Kabupaten Tulungagung telah berupaya mengoptimalkan komunikasi kebencanaan dalam penanganan risiko banjir, masih terdapat berbagai tantangan struktural dan kontekstual yang memengaruhi efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi, perbedaan tingkat pendidikan dan literasi kebencanaan masyarakat, serta kondisi geografis wilayah Tulungagung yang beragam, mulai dari daerah perkotaan hingga perdesaan dan kawasan rawan banjir yang relatif sulit dijangkau. Kondisi ini menyebabkan informasi kebencanaan tidak selalu dapat tersebar secara cepat dan merata, terutama pada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi informasi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tulungagung mengakui bahwa:

“tantangan terbesar kami adalah memastikan informasi dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat, terutama yang tinggal di daerah rawan dan memiliki keterbatasan akses teknologi”.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa persoalan komunikasi kebencanaan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga dengan kemampuan sistem komunikasi pemerintah daerah dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif.

Pendekatan berbasis komunitas dinilai lebih efektif dalam menjembatani kesenjangan informasi, karena melibatkan aktor lokal seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, dan relawan kebencanaan yang memahami karakteristik sosial dan budaya setempat (Frasetya et al, 2021). Perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi kebencanaan menjadi tantangan tersendiri bagi BPBD. Informasi yang bersifat teknis sering kali sulit dipahami oleh masyarakat awam jika tidak disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan kontekstual. BPBD Kabupaten Tulungagung perlu mengembangkan strategi komunikasi yang adaptif, dengan menyesuaikan pesan, media, dan metode penyampaian informasi berdasarkan karakteristik kelompok sasaran, termasuk kelompok rentan yang tinggal di wilayah rawan banjir.

Berdasarkan tantangan tersebut, strategi optimalisasi komunikasi pemerintah daerah di Kabupaten Tulungagung perlu diarahkan pada integrasi sistem komunikasi kebencanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) BPBD, serta pelibatan aktif masyarakat sebagai mitra dalam mitigasi banjir. Integrasi sistem komunikasi memungkinkan informasi dari berbagai sumber seperti laporan masyarakat, data lapangan, dan informasi dari instansi terkait

dikelola secara terpadu dan disebarluaskan secara lebih efektif. Sementara itu, peningkatan kapasitas SDM BPBD, khususnya dalam bidang komunikasi risiko dan pemanfaatan teknologi informasi, menjadi prasyarat penting agar pesan kebencanaan dapat disampaikan secara jelas, cepat, dan kredibel. Pelibatan aktif masyarakat sebagai mitra strategis juga sejalan dengan konsep pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (community-based disaster risk reduction) yang terbukti mampu meningkatkan ketahanan masyarakat secara berkelanjutan (UNISDR, 2015; Manyena et al., 2011). Strategi komunikasi yang terencana, terintegrasi, dan partisipatif, BPBD Kabupaten Tulungagung diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan komunikasi kebencanaan serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap risiko banjir secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini juga menemukan berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi komunikasi kebencanaan di Kabupaten Tulungagung, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi, perbedaan tingkat literasi kebencanaan masyarakat, kondisi geografis wilayah yang beragam, serta belum optimalnya komunikasi internal dan eksternal BPBD. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih terencana dan terintegrasi, meliputi penguatan sistem informasi kebencanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia BPBD, serta pelibatan aktif masyarakat sebagai mitra dalam mitigasi banjir melalui pendekatan berbasis komunitas. Strategi komunikasi yang inklusif, adaptif, dan partisipatif, BPBD Kabupaten Tulungagung diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan, respons, dan ketahanan masyarakat terhadap risiko banjir secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Arzuri, M. R., & Zulfiningrum, R. (2025). Disaster communication dalam mitigasi penanggulangan banjir. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 12(1), 449–458. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/7754>
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2024). Prakiraan daerah potensi banjir bulan Februari 2025. <https://bpbd.banyumaskab.go.id/news/50550/prakiraan-daerah-potensi-banjir-jawa-tengah-bulan-desember-2024>
- Budi. (2011). Komunikasi kebencanaan dan tantangan integrasi kebijakan pemerintah dengan karakteristik masyarakat lokal. Rajawali Pers.
- Choirul, A. (2019). Manajemen penanggulangan bencana berbasis mitigasi dan kesiapsiagaan. Deepublish.

- Frasetya, V., Corry W, A., Trenggono, N., & Putra, P. (2021). Komunikasi mitigasi bencana Kota Bandar Lampung. *Komunika*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.24042/komunika.v4i1.8624>
- Haddow, G. D., & Haddow, K. S. (2014). *Disaster communications in a changing media world*. Butterworth-Heinemann.
- Lestari, P. (2018). *Komunikasi bencana: Aspek penting dalam pengurangan risiko bencana*. PT Kanisius.
- Lestari, P., Paripurno, E. T., Nadeak, J., Julistantie, E., Indrasmara, H. P., & Rahayu, E. I. (2022). Simulasi komunikasi bencana melalui pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana (PUSDALOPS PB). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(2), 255–266. <https://doi.org/10.31315/jik.v20i2.7390>
- Littlejohn, S. W. (2006). *Theories of human communication* (9th ed.). Thomson Wadsworth.
- Nurdin, R. (2015). Komunikasi dalam penanggulangan bencana. *Jurnal Simbolika*, 1(1), 51–61.
- Paton, D. (2008). Risk communication and natural hazard mitigation: How trust influences its effectiveness. *Risk Analysis*, 28(2), 429–444. <https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2008.01031.x>
- Paton, D., & Johnston, D. (2017). *Disaster resilience: An integrated approach* (2nd ed.). Charles C. Thomas Publisher.
- Permana, D. (2023). Peran pemerintah daerah dalam menanggulangi risiko bencana banjir di Kabupaten Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 156–165. <https://www.jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/171>
- Rahman, K. A., Nayiroh, L., & Baihaqi, A. F. (2025). Membangun budaya mitigasi bencana di media sosial: Studi pada akun Instagram @infokrw. *Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 14(2), 319–337.
- Rahmawinati, R., & Zulfiningrum, D. (2023). Komunikasi interpersonal dalam organisasi publik pada penanggulangan bencana. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 101–112.
- Safitri, B. V., Fajarica, S. D., Trisula, Y., Maulida, N., & Wahyudi, G. S. (2020). Komunikasi kebencanaan: Suatu strategi dalam membangun masyarakat sadar bencana pada BPBD Kota Mataram. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 6(2), 143–150. <https://doi.org/10.29303/jseh.v6i2.91>
- Silalahi, S. J., & Trimurni, F. (2024). Efektivitas kebijakan penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kecamatan Medan Petisah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 11–19.
- Sopacua, Y., & Salakay, S. (2020). Sosialisasi mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 7(1), 1–10.

- Tresnanti, D. T., Kurniadi, A., Puspito, D. A., Widodo, P., & Kusuma, K. (2024). Komunikasi bencana sebagai sistem mitigasi bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim di Jakarta. *PENDIPA Journal of Science Education*, 8(2), 155–163. <https://doi.org/10.33369/pendipa.8.2.155-163>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (2007). Lembaran Negara Republik Indonesia. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Utami, N. D. (2022). Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana gempa bumi di Kabupaten Majene. *Jurnal Administrasi Publik*, 3, 136–150.
- Wildani, S. (2023). Strategi komunikasi mitigasi penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Cibeber oleh BPBD Kota Cilegon. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara dan Hukum*, 1(1), 189–198. <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.99>